

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Orang dikatakan miskin ketika berada pada situasi secara ekonomi mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya baik dari segi sandang, pangan, maupun papan. Kemiskinan sejatinya merupakan masalah sosial ekonomi yang lumrah dan selalu ada pada setiap wilayah baik di daerah atau bahkan ditingkat negara. Kemiskinan juga berkaitan dengan terbatasnya lapangan pekerjaan pada suatu wilayah. Seseorang yang masuk dalam kategori miskin atau *the poor* yaitu orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dan dari segi pendidikan juga segi kesehatan kurang memadai (Estrada and Wenagama, 2020).

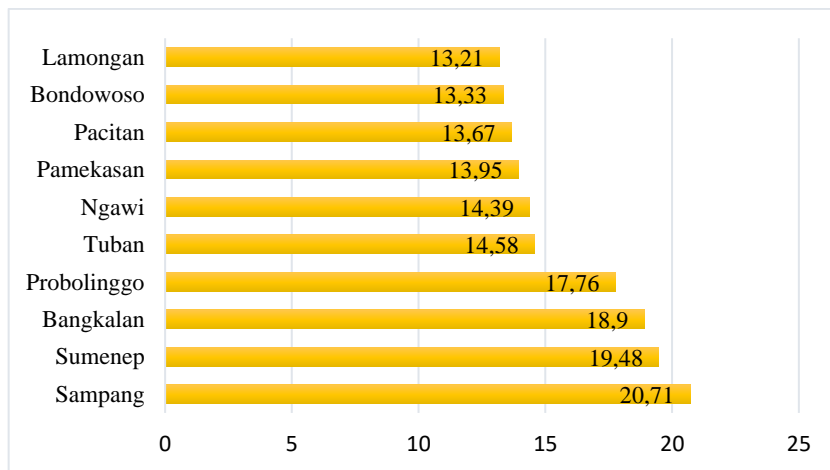
Berdasarkan Bank Dunia, penyebab kemiskinan di suatu negara tidak lain karena kurangnya pendapatan dan asset negara (*Lack Of Income and Assets*) dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya mulai dari sandang, pangan, papan, pendidikan, dan juga tingkat kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah perlu keseriusan dalam mengambil kebijakan-kebijakan daerah sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Keberadaan program pengentasan kemiskinan telah menjadi tujuan pokok pembangunan dan menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai efektifitas pelaksanaan program-program pembangunan pada suatu daerah (Pratama and Utama, 2019).

Di Indonesia masalah kemiskinan telah muncul sebelum datangnya masa penjajahan, tetapi sampai sekarang permasalahan tersebut belum juga usai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik diketahui bahwa tingkat kemiskinan Indonesia tahun 2010 – 2020 mengalami pergerakan yang fluktuatif. Tetapi

peningkatan cukup tinggi terjadi ditahun 2013 dan 2015 yang dipicu oleh kenaikan harga pokok akibat dari lonjakan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), juga di tahun 2020 penyebab utama tingginya angka kemiskinan karena adanya Pandemi Covid-19 di Indonesia.

Kemiskinan merupakan tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah. Tinggi rendahnya angka kemiskinan daerah tergantung bagaimana daerah yang bersangkutan dalam upaya penanggulangannya. Di Jawa Timur sendiri angka kemiskinan daerah mampu ditekan, berdasarkan Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya penurunan yang cukup stabil di setiap tahunnya. Tetapi terdapat beberapa Kabupaten yang angka kemiskinannya masih tergolong tinggi.

Gambar 1. 1 Kemiskinan Tertinggi Jawa Timur Tahun 2020

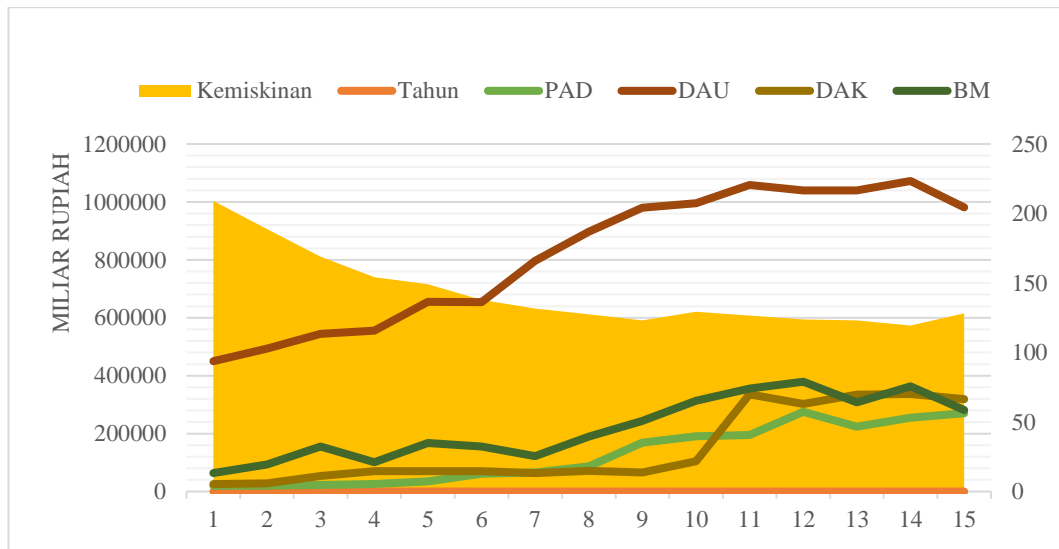


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Gambar 1.1 diatas memperlihatkan bahwa 10 Kabupaten di Jawa Timur yang tergolong tinggi antara lain yaitu mulai dari urutan Kabupaten termiskin adalah: Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Ngawi, Kabupaten

Pamekasan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Lamongan. Kabupaten Ngawi masuk dalam kategori 10 besar Kabupaten termiskin se Jawa Timur yaitu di urutan ke enam dengan angka kemiskinan sebesar 14,39 persen.

Gambar 1. 2 Kemiskinan, PAD, DAU, DAK, BM



Sumber: BPS Kabupaten Ngawi, 2022

Berdasarkan pada gambar 2.2 terlihat bahwa mula-mula jumlah kemiskinan di Kabupaten Ngawi tahun pertama (th.2006) sampai tahun ke empat (th.2009) mengalami penurunan yang cukup drastis. Tetapi di tahun selanjutnya jumlah kemiskinan cenderung mengalami pergerakan yang fluktuatif. Jika diperhatikan di tahun ke sembilan (th.2014) jumlah kemiskinan mulai bergerak menurun yaitu diangka 123 ribu jiwa, kemudian tahun berikutnya kembali bergerak naik diangka 129 juta jiwa dan kembali berangsur membaik sampai tahun 2019. Kembali naik melejit di tahun 2020 dalam waktu kurang lebih hanya satu tahun. Hal ini terjadi karena Kabupaten Ngawi jadi salah satu daerah yang terdampak akibat dari munculnya pandemi virus Covid-19. Pandemi Covid-19 ini

masuk di Indonesia di awal 2020 dan membuat jumlah kemiskinan di Indonesia naik, begitu juga jumlah kemiskinan di Kabupaten Ngawi kembali naik dikisaran angka 130 juta jiwa.

Pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia terutama di Kabupaten Ngawi yaitu dengan menerapkan berbagai macam kebijakan. Upaya penurunan angka kemiskinan yang dilakukan tersebut tentunya harus berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Mulai dari meminimalisir adanya ketimpangan melalui pemerataan pembangunan daerah khususnya peningkatan sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Kebijakan peletakan dasar otonomi daerah ditetapkan dengan mempertimbangkan dimana wilayah terdekat yang mampu menjangkau masyarakatnya. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, maka mempermudah pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggungjawab pembangunan sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan daerah terkait (Rasu, Kumenaung and Koleangan, 2019).

Otonomi daerah merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang terdiri dari penyerahan juga pengalihan pembiayaan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang ada. Dengan begitu daerah memiliki peluang yang besar dalam memanfaatkan potensi demi terpenuhinya kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat. Kebijakan yang dijalankan tersebut haruslah efektif, efisien, serta menyokong peranan masyarakat dalam upaya meningkatkan pemerataan dan keadilan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat dan lonjakan angka kemiskinan dapat ditekan (I *et al.*, 2015).

Penerapan kebijakan otonomi daerah sejalan dengan kemunculan desentralisasi fiskal sebagai pengatur terkait ketersediaan fasilitas publik yang layak dan memadai (Prastika Rany, 2021). Sehingga pemanfaatan akan potensi daerah dapat dilakukan secara maksimal dan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan jumlah lapangan pekerjaan. Dalam memperlancar penerapannya sebuah daerah perlu adanya alat yang bertanggungjawab atas terlaksananya otonomi daerah yaitu APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Nurhalimah, Hendrati and Asmara, 2021).

APBD memiliki kedudukan yang tinggi dalam sebuah pemerintahan, karena perannya sebagai pemegang tanggungjawab atas berjalannya otonomi daerah. Dengan adanya APBD maka program-program pemerintah daerah dapat berjalan mulai dari program pemenuhan pelayanan terhadap masyarakat dan program pemenuhan instrumen keuangan daerah yang lain. Kedudukan APBD semakin kuat pada era desentralisasi fiskal, dimana kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan kinerja daerahnya diketahui oleh masyarakat. Komponen utama APBD yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan tetapi kontribusi terbesar pembentuk penerimaan daerah yaitu berasal dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan (Sulastri and Efendri, 2019).

Upaya pengentasan kemiskinan pada suatu daerah sejatinya dapat terlihat dari siklus pengeluaran daerahnya terkhusus pada pengeluaran belanja modal. Karena anggaran belanja modal dikeluarkan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan publik mulai dari sarana dan prasarana umum. Belanja modal dialokasikan dalam bentuk aset tetap dengan tujuan untuk meningkatkan

produktivitas perekonomian daerah. Karena belanja modal merupakan investasi pemerintah sebagai upaya peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Belanja modal merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi kemiskinan pada suatu daerah (Saraswati and Arka, 2016)

Terlihat pada gambar 1.2 terkait dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Ngawi sendiri mengalami kenaikan tiap tahunnya. Dan hal ini sudah sesuai dengan kondisi besaran Nilai Tukar Petani (NTP), dimana dana tranferan pemerintah pusat akan di seimbangkan dengan besaran Nilai Tukar Petani daerah. Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik dengan metode KSA (Survei Kerangka Sampel Area) tahun 2019 menyebutkan bahwa Kabupaten Ngawi jadi produsen beras tertinggi dan disebut sebagai lumbung padi nasional.

Oleh karena itu untuk mempertahankannya maka pemerintah pusat berkewajiban untuk mentransfer dana sesuai kebutuhan dan prioritas daerah Kabupaten Ngawi. Transfer dana bertujuan untuk program pemerataan daerah dengan tetap memperhatikan potensi daerah, luas daerah, kondisi geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat sehingga memperkecil ketimpangan di Kabupaten Ngawi.

Dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa pergerakan Dana Alokasi Umum menjadi dana yang paling tinggi dan tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran terbesar yang membiayai program-program pembangunan daerah di Kabupaten Ngawi berasal

dari Dana Alokasi Umum. Walaupun anggaran Dana Alokasi Khusus tidak sebesar anggaran Dana Alokasi Umum tetapi pergerakan tiap tahunnya pun mengalami peningkatan yang hampir sama dengan dengan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. Pergerakan Belanja Modal yang hampir sama pergerakannya dengan penerimaan daerah ini maka bisa dikatakan bahwa anggaran yang dikeluarkan atau dibelanjakan Kabupaten Ngawi ini seimbang dengan anggran yang diterima Kabupaten Ngawi.

Gambar 1.2 juga memperlihatkan bagaimana pergerakan Pendapatan Asli Daerah yang mengalami kenaikan ditiap tahunnya walaupun masih dibawah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal. Tetapi hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Ngawi mulai tahap mengembangkan potensi daerah misalnya dengan melakukan renovasi tempat-tempat priwisata. Karena Pendapatan Asli Daerah sendiri bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan daerah yang sah (Taryono and Ekwarso, 2012).

Pendapatan Asli Daerah juga dikategorikan sebagai sumber pembiayaan utama yang baik dalam kelangsungan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Semakin tinggi sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat pun semakin kecil. Karena pendapatan asli daerah dapat dijadikan tolak ukur kemandirian daerah dalam upaya penyelenggaraan dan mewujudkan otonomi daerah (Fitriyanti and Handayani, 2020).

Dari ulasan diatas dapat ditarik benang merah, bahwa antara anggaran yang diterima maupun dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi yang tiap tahunnya cenderung meningkat tentunya hal tersebut bagus untuk pengembangan daerah, peningkatan mutu pelayanan, dan lain sebagainya. Tetapi peningkatan anggaran baik Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan pengeluaran berupa Belanja Modal daerah belum mampu menyeimbangkan dengan penurunan jumlah kemiskinan di Kabupaten Ngawi karena sampai kini masih tergolong tinggi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, sejak 2012 Kabupaten Ngawi masuk sebagai kategori Kabupaten termiskin dengan urutan ke enam dari sepuluh Kabupaten termiskin se Jawa Timur.

Berlandaskan pada uraian tersebut, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai kemiskinan di Kabupaten Ngawi dengan judul **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Ngawi Tahun 2006 – 2020.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang diatas didapat rumusan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Ngawi tahun 2006 – 2020?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Ngawi tahun 2006 – 2020?

3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Ngawi tahun 2006 – 2020?
4. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Ngawi tahun 2006 – 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ni adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi tahun 2006 – 2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi tahun 2006 – 2020.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi tahun 2006 – 2020.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi tahun 2006 – 2020.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan ruang lingkup penelitian ini ditentukan menggunakan variabel independen antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal sedangkan variabel dependen yaitu Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Ngawi dalam kurun waktu 15 Tahun (2006 – 2020).

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang Tingkat Kemiskinan.
- b. Bagi Pihak Lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pelaksanaan kegiatan penelitian dengan tema yang sama agar terdapat perbaikan dan juga pembaharuan.
- c. Bagi Lembaga Terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah merancang strategi pembangunan yang tepat sasaran untuk mendapatkan sumber pendapatan daerah yang terus meningkat, sehingga dapat meningkatkan pula belanja daerah khususnya belanja modal yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan di masyarakat.